

Abstrak

Laju perekonomian tidak dapat dipisahkan dari kontribusi pengusaha dan pekerja untuk menjalankan usaha dan roda perekonomian, namun pada kasus PHK sering terjadi ketidakadilan, hal tersebut diawali dari adanya aturan yang tidak memihak pada pekerja sehingga banyak kasus PHK yang diputus dengan tidak memperhatikan unsur keadilan pekerja. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana mengapa pengusaha dalam pemberian pesangon dan hak-hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum memenuhikeadilan, (2) apakah factor penyebab kelemahan pemberian pesangon dan hak-hak pekerja dan (3) bagaimana rekonstruksi hukum yang berkeadilan pada PHK. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dan analisis data dilakukan kualitatif. Hasil penelitian: 1) pengusaha dalam pemberian pesangon dan hak-hak pekerja akibat PHK belum memenuhi keadilan karena pekerja memiliki nilai tawar yang lebih rendah dan undang-undang tidak mampu memberikan perlindungan kepada pekerja; 2) Pasal 156 Ayat (2),Ayat(3) dan Ayat (4) huruf c terdapat kelemahan yuridis dalam pemberian pesangon dan hak-hak pekerja akibat PHK oleh pengusaha belum memenuhi keadilan adalah tidak adanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kelemahan struktural terjadi karena panjangnya tahapan penyelesaian sengketa dan kultur hukum yang tidak pro pekerja dan 3) Rekonstruksi dilakukan pada Pasal 156Ayat(2), Ayat (3) dan Ayat (4) huruf c untuk memenuhi tujuan hukum yakni keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta disesuaikan dengan sistem hukum Pancasila yang merupakan sistem hukum yang dapat mengakomodir nilai-nilai sosial dan nilaiPancasila.

Kata kunci: keadilan, pemutusan hubungan kerja, kepastian hukum

Abstract

The economic rate cannot be separated from the contribution of employers and workers to run businesses, but in the case of layoffs there is often injustice. The injustice occurs due to improper rules that do not regard to workers. Therefore so many cases of layoffs are dismissed without regard to the element of labor justice. Problem statement of this research are (1) how employers in granting severance and workers' rights due to Termination of Employment (PHK) have not fulfilled justice, (2) what are the factors causing weaknesses in severance pay and workers' rights and (3) how the legal reconstruction is justly laid off. The study was conducted with an empirical juridical approach and data analysis was done qualitatively

Research results: 1) employers in granting severance and workers' rights due to layoffs have not fulfilled justice because workers have lower bargaining value and the law is not able to provide protection to workers; 2) Article 156 Paragraphs (2), Paragraph (3) and Paragraph (4) Alfabeth C there are juridical weaknesses in granting severance and workers' rights due to layoffs by employers not fulfilling justice is the absence of legal certainty, legal justice and legal benefit. Structural weaknesses occur because of the long stages of dispute resolution and the non-pro-work legal culture and 3) Reconstruction is carried out on Article 156 Paragraph (2), Paragraph (3) and Paragraph (4) Alfabeth C to meet the legal goals of legal justice, legal certainty and legal usefulness and adapted to the Pancasila legal system which is a legal system that can accommodate social values and Pancasila values.

Keywords: fairness, termination, legal certainty